

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA  
LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II  
DALAM PROGRAM KARTU INDONESIA  
PINTAR KULIAH (KIP-K)  
DI KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :**

**MUHAMMAD ADITYA**

**NIM. 07011282126053**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA  
LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II DALAM  
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)  
DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Dalam Menempuh Drajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

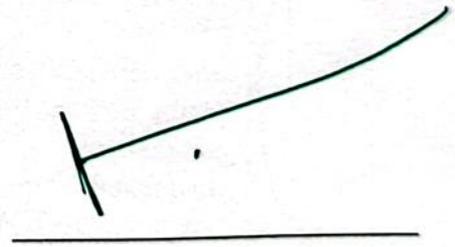
**Oleh:**

**MUHAMMAD ADITYA  
NIM.07011282126053**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 04 Maret 2025

**Pembimbing**

**Dr. Andries Lionardo, M.Si.  
NIP.197905012002121005**



**Mengetahui  
Ketua Jurusan**

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.  
NIP.1969111019940110**



# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II DALAM PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

### SKRIPSI

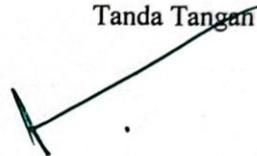
Oleh  
**MUHAMMAD ADITYA**  
NIM.07011282126053

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 13 Maret 2025

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Dr. Andries Lionardo, M.Si.  
NIP.197905012002121005



Penguji:

1. Lisa Mandasari, S.IP., M.SI  
NIP. 198603272023212029

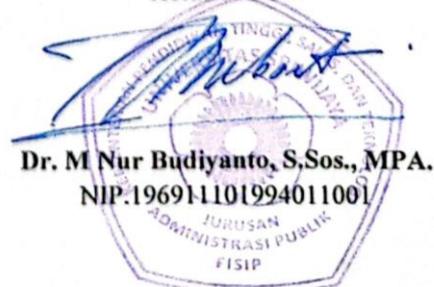


2. Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.SI.  
NIP. 198902222023212044



Mengetahui

Ketua Jurusan



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Muhammad Aditya  
NIM : 07011282126053  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa Skripsi yang berjudul **“Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Kota Palembang tahun 2024”** ini adalah sebenar – benarnya karya sendiri dan dalam penyusunannya saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang telah di tetapkan kepada saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas yang dibuat secara sadar dan tanpa ada sedikit pun paksaan dari pihak lain.



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

*"Let it happen"*

### **Persembahan**

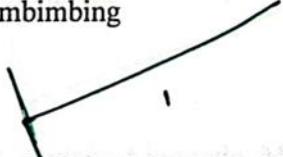
Bismillah hir-Rahman ir-Rahim,  
Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa membimbing langkahku, serta kedua orang tua tercinta yang doa dan pengorbanannya selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidupku.

## Abstrak

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KEMDIKTISAINTEK) di tingkat regional, LLDIKTI Wilayah II memiliki peran kunci dalam memastikan efektivitas program pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Meskipun KIP-K dirancang sebagai program bantuan pendidikan yang inklusif dan berdampak positif, implementasinya kerap menghadapi isu terkait ketidaktepatan sasaran, baik di tingkat nasional maupun lokal, seperti di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam program KIP-K tahun 2024, dengan fokus pada Implementasi Tugas dan Fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam Program KIP-K. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Kerangka analisis didasarkan pada Model Implementasi Richard Matland (1995) yang menilai empat dimensi: ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target penerima, dan lingkungan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, LLDIKTI Wilayah II telah menjalankan program KIP-K sesuai pedoman yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti terkait Dinamika sosio-ekonomi Mahasiswa, Sentimental Publik terhadap LLDIKTI serta kendala teknis yang dialami oleh Perguruan Tinggi Swasta sebagai mitra pelaksana.

**Kata Kunci :** LLDIKTI Wilayah II, KIP Kuliah, Implementasi Kebijakan, Richard Matland, Ketepatan Sasaran, Perguruan Tinggi Swasta, Sosio-ekonomi.

Pembimbing

  
**Dr. Andries Lionardo, M.Si.**  
NIP.197905012002121005

Indralaya, --/--/----  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP.196911101994011001

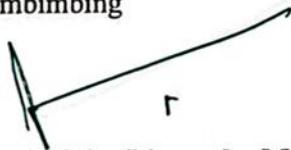


## **Abstract**

*As the regional extension of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology (KEMDIKTISAINTEK), LLDIKTI Region II plays a key role in ensuring the effectiveness of government programs, including the Indonesia Smart College Card (KIP- K). Although KIP-K is designed as an inclusive educational assistance program with positive impacts, its implementation often faces issues related to target inaccuracy, both at the national and local levels, such as in Palembang, South Sumatra. This study aims to analyze the implementation of LLDIKTI Region II's duties and functions in the KIP-K program in 2024, focusing on the Implementation of LLDIKTI Region II's Duties and Functions in the KIP-K Program. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and document analysis. The analytical framework is based on Richard Matland's (1995) Implementation Model, which evaluates four dimensions: policy accuracy, execution, recipient targeting, and supporting environment. The findings indicate that, in general, LLDIKTI Region II has implemented the KIP-K program in accordance with established guidelines. However, its execution still faces challenges, including the socio-economic dynamics of students, public sentiment towards LLDIKTI, and technical difficulties encountered by Private Higher Education Institutions as implementation partners.*

**Keywords:** *LLDIKTI Region II, KIP Kuliah, Policy Implementation, Richard Matland, Target Accuracy, Private Universities, Transparency, Socio-Economics.*

Pembimbing

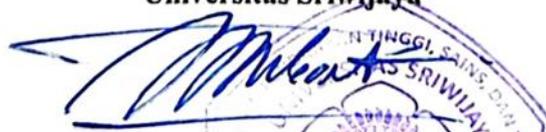


**Dr. Andries Lionardo, M.Si.**

NIP.197905012002121005

Indralaya, --/--/----

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
NIP.196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Kota Palembang tahun 2024" ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan di berbagai aspek. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini tentu banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan yang tidak terhingga nilainya.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Alfitri., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc . Selaku Kepala LLDikti Wilayah II Kota Palembang.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. Selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi.

7. Seluruh Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) LLDIKTI Wilayah II.
8. Teman-teman yang telah berjasa dalam melancarkan jalan penulis untuk menyusun Skripsi ini, Cindy, Rama. Terima kasih!
9. Wave to Earth, Hindia, Feast, Lomba Sihir, Beabadoobee, Lamp, the 1975 dan TV Girl yang telah menemani penulis melalui alunan musik yang memberi inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. *And when it happens, when it happens (I won't be holding on) So let it happen, let it happen.* Sebuah kutipan lirik yang mengingatkan penulis untuk selalu menerima dan menjalani setiap proses dengan lapang dada.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Juga harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Palembang, 3 Maret 2025

Penulis

Muhammad Aditya

NIM.07011282126053

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
Abstract .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2.2 Pengertian Implementasi .....	14
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	15
2.4 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan .....	17
2.5 Model Implementasi Kebijakan .....	18
2.6 Konsep Tugas dan Fungsi .....	24
2.7 LLDIKTI .....	26
2.8 Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah .....	28
2.9 Penelitian Terdahulu .....	32
2.10 Kerangka Teori .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Definisi Konsep .....	39
3.3 Fokus Penelitian .....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	40

3.5 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.6 Informan Penelitian .....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV .....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
4.1 Deskripsi Informan Penelitian .....	46
4.1. Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Ketepatan Kebijakan .....	51
4.2.1.1 Sejauh Mana Kebijakan Menyelesaikan Masalah yang Ada	52
4.2.1.2 Kesesuaian Kebijakan dengan Karakteristik Masalah .....	55
4.2.1.3 Otoritas dan Kesesuaian dengan Misi Lembaga .....	58
4.2.2 Ketepatan Pelaksanaan.....	61
4.2.2.1 Kesesuaian Prosedur dan Mekanisme dengan Regulasi .....	62
4.2.2.2 Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga.....	69
4.2.3 Ketepatan Target.....	74
4.2.3.1 Kesesuaian Target dengan Sasaran Program.....	75
4.2.3.2 Inovasi dan Efektivitas Program dalam Mencapai Sasaran .	82
4.2.4 Ketepatan Lingkungan .....	88
4.2.4.1 Lingkungan Kerja Sama Antar Lembaga.....	89
4.2.4.2 Opini Publik terhadap Peran LLDIKTI II dalam Implementasi KIP-K .....	92
4.3 Pembahasan .....	96
4.3.1. Ketepatan Kebijakan.....	96
4.3.1.1. Sejauh Mana Kebijakan Menyelesaikan Masalah yang Ada	96
4.3.1.2. Kesesuaian Kebijakan dengan Karakteristik Masalah.....	97
4.3.1.3. Otoritas dan Kesesuaian dengan Misi Lembaga .....	99
4.3.2. Ketepatan Pelaksanaan .....	100
4.3.2.1. Kesesuaian Prosedur dan Mekanisme dengan Regulasi ...	100
4.3.2.2. Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga.....	101
4.3.3. Ketepatan Target.....	102
4.3.3.1 Kesesuaian Target dengan Sasaran Program.....	102
4.3.3.2 Inovasi dan Efektivitas Program dalam Mencapai Sasaran	103

4.3.4. Ketepatan Lingkungan.....	105
4.3.4.1 Lingkungan Kerja Sama antar Lembaga.....	105
4.3.4.2 Opini Publik terhadap Peran LLDIKTI II dalam Implementasi KIP-K .....	106
BAB V .....	119
KESIMPULAN DAN SARAN .....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran .....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan.....	3
Tabel 2 Data Perguruan Tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDiikti) Wilayah II Kota Palembang Berdasarkan Wilayah Kerja (28 Maret 2024).....	6
Tabel 3 Sebaran Kuota KIP-K LLDIKTI Wilayah II Tahun 2024 di Kota Palembang .....	9
Tabel 4 Matriks Matland .....	22
Tabel 5 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 6 Fokus Penelitian .....	40
Tabel 7 Informan Penelitian .....	43
Tabel 8 Matriks Hasil Penelitian .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Jumlah Mahasiswa Penerima KIP-K di LLDIKTI Wilayah II ...	8
Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan menurut Brian W. Hoogwood & Lewis A.Gun.....	19
Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle.....	21
Gambar 4 Model Keefektifan Implementasi Kebijakan menurut Richard Matland .....	24
Gambar 5 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah II.....	26
Gambar 6 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 7 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMK Negeri 8 Palembang .....	83
Gambar 8 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMK YP GAJAH MADA Palembang .....	84
Gambar 9 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMA Negeri 20 Palembang .....	84
Gambar 10 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMA Negeri 8 Palembang .....	85
Gambar 11 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMK Negeri 8 Palembang .....	85

## DAFTAR SINGKATAN

IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
APK	: Angka Partisipasi Kasar
BPS	: Badan Pusat Statistik
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
PUSLAPDIK	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
KIP-K	: Kartu Indonesia Pintar Kuliah
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
PIP	: Program Indonesia Pintar
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
PKH	: Program Keluarga Harapan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Dimana melalui pendidikan, diharapkan akan menjadi bekal bagi para generasi muda dalam mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya, sehingga menjadi individu yang terampil, cerdas, dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya dalam Bab II pasal 3, yang menyatakan bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa melalui proses pembelajaran, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Pendidikan hingga sekarang, masih menjadi investasi jangka panjang yang esensial guna menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas namun juga mampu bersaing di kancah global. Elchanan Cohn (1979) mengemukakan bahwa individu yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan akan memperoleh lebih banyak peluang seperti mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktifitas, dan peningkatan pendapatan di dalam kehidupannya, serta tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan memperoleh manfaat dari produktivitasnya. Cita-cita tersebut dapat

diaktualisasikan melalui meratanya pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan jenjang pendidikan tinggi Riski Sapitri Siregar et al. (2022)

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara. Ia berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta menjadi roda pendorong akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, pendidikan tinggi memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, dasar yang paling penting adalah memastikan akses pendidikan tinggi yang tidak hanya tersebar merata, tetapi juga berkualitas, untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses pendidikan tinggi. Masih terdapat *GAP* yang besar Antara mereka yang berada dalam kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dengan mereka yang secara ekonomi masih mengalami berbagai keterbatasan (Anwar, 2022). Salah satunya yakni Keterbatasan Finansial. Keterbatasan finansial menjadi hambatan utama bagi banyak kelompok masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, per-tahun 2024 masih menunjukkan bahwa masih rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi atau APK PT di Indonesia.

**Tabel 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**

<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan</b>											
<b>SD/Sederajat</b>			<b>SMP/Sederajat</b>			<b>SMA/Sederajat</b>			<b>PT</b>		
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
106,20	106,27	105,62	92,80	92,11	92,51	85,23	85,49	86,34	31,19	31,16	31,45

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023) diolah oleh penulis

Mengutip dari Badan Pusat Statistik (2023) Dapat dilihat dari tabel di atas, per-tahun 2023 terkait data APK menurut jenjang pendidikan, dimana hal ini menunjukkan sebuah pola piramida terbalik, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kecil juga proporsi individu yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di Indonesia, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menunjukkan pola seperti adanya penggerusan pada tiap jenjang pendidikan. Dimana Pada jenjang pendidikan dasar, seperti SD dan SMP, APK yang ada cenderung sangat tinggi. Namun, seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, seperti SMA dan perguruan tinggi, angka partisipasi kasar mulai mengalami penurunan yang signifikan. Kendala utamanya dapat dari banyak faktor, tapi faktor yang masih menjadi penyebab utama yakni terkait dengan faktor ekonomi, dimana biaya kuliah dirasa masih sangat tinggi bagi sebagian besar Masyarakat Indonesia. Dimana, hal ini menciptakan kesenjangan yang berpotensi membatasi kesempatan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Mendapati bahwa pentingnya mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk

meningkatkan aksesibilitas serta akselerasi pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang memiliki potensi akademik namun terkendala biaya. Oleh karena itu, KIP-K hadir sebagai solusi konkret dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia

Sebagai upaya memastikan bahwa program KIP-K dapat diimplementasikan dengan baik guna mencapai tujuannya secara garis besar, tentunya dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari beberapa stakeholder yang memegang peranan penting dalam rangka memastikan Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan di Indonesia, salah satunya yakni Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menjadi salah satu stakeholder kunci yang perannya sangat krusial. LLDIKTI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi di wilayah kerjanya, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan tinggi salah satunya melalui pelaksanaan program KIP Kuliah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pasal 3 dimana LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam hal ini, LLDIKTI memiliki tugas dan fungsi dalam memastikan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berjalan tanpa hambatan. Lebih rinci, adapun tugas dan fungsi LLDIKTI dalam penyelenggaraan Program KIP-K ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, dimana LLDIKTI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;

- 1) Melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Swasta untuk kemudian diserahkan sebagai usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik.
- 2) Melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan Pedoman Teknis yang mencakup pengelolaan, verifikasi, sinkronisasi, penyaluran, dan monitoring evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik.
- 3) Mengajukan usulan kepada Puslapdik untuk penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima.
- 4) Melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi kepada Perguruan Tinggi Swasta.
- 5) Memberikan informasi kepada Perguruan Tinggi Swasta jika terjadi keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

Kemudian, terkait fungsi sendiri. LLDIKTI memiliki fungsi antara lain;

- 1) LLDIKTI berperan sebagai Pengelola Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta.
- 2) LLDIKTI berperan sebagai koordinator pelaksanaan Program KIP Kuliah di wilayah kerjanya.
- 3) LLDIKTI juga memberikan fasilitasi kepada perguruan tinggi dalam proses pelaksanaan Program KIP Kuliah.

- 4) LLDIKTI melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Program KIP Kuliah di perguruan tinggi di wilayah kerjanya.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) di tingkat wilayah, Dalam hal ini LLDIKTI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program KIP Kuliah dapat berjalan secara efektif dan optimal di wilayah kerjanya masing-masing, termasuk di dalamnya LLDIKTI Wilayah II.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II mempunyai wilayah kerja yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung dengan sebaran jumlah keseluruhan perguruan tinggi sebagai berikut :

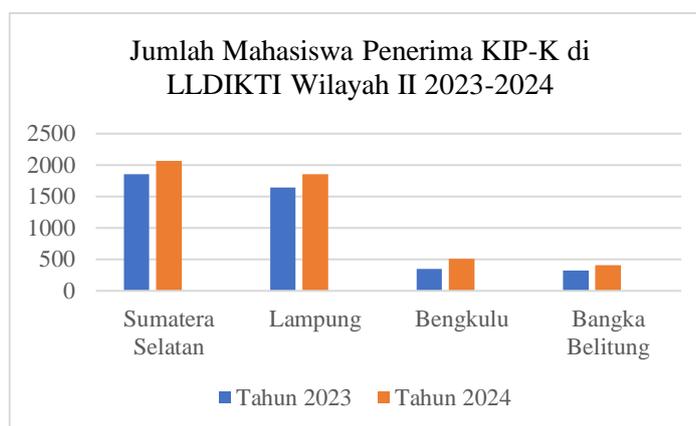
**Tabel 2 Data Perguruan Tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II Kota Palembang Berdasarkan Wilayah Kerja (28 Maret 2024)**

No	Provinsi	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Akademi	Politeknik	Akademi Komunitas	Jumlah	PTN
1	Sumatera Selatan	24	5	35	13	5	1	86	2
2	Lampung	14	8	23	16	2	-	63	3
3	Bengkulu	5	-	6	3	1	-	15	2
4	Kep. Bangka Belitung	3	3	2	-	2	1	11	2
Total		46	19	65	32	10	2	174	9

Sumber : Data & Angka Perguruan Tinggi -LLDIKTI 2 (n.d.)

Dapat dilihat pada tabel diatas, dimana tabel diatas dapat memberikan gambaran mengenai jumlah perguruan tinggi wilayah kerja LLDIKTI Wilayah II, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Data tersebut mencakup berbagai jenis perguruan tinggi, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan akademi komunitas, serta total jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di setiap provinsi. Sumatera Selatan memiliki 86 perguruan tinggi, terdiri dari 24 universitas, 8 institut, 35 sekolah tinggi, 13 akademi, 5 politeknik, dan 1 akademi komunitas, dengan 2 di antaranya adalah perguruan tinggi negeri. Lampung memiliki total 63 perguruan tinggi yang terbagi menjadi 14 universitas, 8 institut, 23 sekolah tinggi, 16 akademi, dan 2 politeknik. Di provinsi ini, terdapat 3 perguruan tinggi negeri. Bengkulu memiliki 15 perguruan tinggi, termasuk 5 universitas, 6 sekolah tinggi, 3 akademi, dan 1 politeknik, dengan 2 di antaranya adalah perguruan tinggi negeri. Kepulauan Bangka Belitung memiliki 11 perguruan tinggi, yang terdiri dari 3 universitas, 3 institut, 2 sekolah tinggi, 2 politeknik, dan 1 akademi komunitas. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Gambar 1 Grafik Jumlah Mahasiswa Penerima KIP-K di LLDIKTI Wilayah II Tahun 2023-2024**



Sumber : LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang (2024).

Pada tahun 2024, jumlah penerima KIP-K di LLDIKTI Wilayah II mengalami peningkatan di seluruh provinsi. Sumatera Selatan naik dari 1.856 menjadi 2.063 mahasiswa, Lampung dari 1.640 menjadi 1.853 mahasiswa, Bengkulu dari 350 menjadi 511 mahasiswa, dan Bangka Belitung dari 322 menjadi 412 mahasiswa. Secara total, jumlah penerima bertambah dari 4.168 pada tahun 2023 menjadi 4.839 mahasiswa pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen LLDIKTI dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu.

Pada dasarnya, KIP-K merupakan sebuah program yang mulia dan tentunya memiliki dampak positif yang signifikan. Namun, implementasinya di lapangan seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hingga sekarang, masih terdapat "Kesenjangan". Mengutip dari BBC News Indonesia (2024) Banyak Isu yang menyangkut KIP Kuliah ini, salah satu isu yang menjadi isu nasional saat ini dan kerap menjadi sorotan masyarakat luas adalah terkait masalah "Tidak tepat sasaran" dalam pemberian bantuan KIP-K. Ketidaktepatan ini terkait dalam hal

prioritas atau persyaratan penerima KIP-K sesuai dengan Peraturan yang ada. Dimana ketidakakuratan data ekonomi calon penerima sering menjadi masalah utama, di mana mahasiswa dari keluarga mampu justru lolos seleksi akibat lemahnya verifikasi dan seleksi yang dilakukan. Isu "tidak tepat sasaran" ini tidak hanya menjadi permasalahan nasional, tetapi juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bawah naungan LLDIKTI Wilayah II.

**Tabel 3 Sebaran Kuota KIP-K LLDIKTI Wilayah II Tahun 2024 di Sumatera Selatan**

No	Kabupaten Kota	Jumlah Kuota	Presentase
1	Banyuasin	3	0,17%
2	Lahat	5	0,37%
3	Lubuklinggau	129	8,63%
4	Muara Enim	5	0,37%
5	Musi Banyuasin	27	1,82%
6	Musi Rawas	6	0,41%
7	Ogan Komering Ilir	25	1,66%
8	Ogan Komering Ulu	83	5,52%
9	Ogan Komering Ulu Timur	174	11,61%
10	Pagar Alam	61	4,06%
11	Palembang	1495	62,01%
12	Prabumulih	50	3,36%
<b>TOTAL</b>		2063	100,00%

Sumber : LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang (2024).

Dapat dilihat pada tabel diatas. Per-tahun 2024, distribusi kuota KIP-K di Kota Palembang menunjukkan angka yang sangat signifikan. Dimana Kota Palembang menjadi daerah dengan sebaran kuota paling banyak dibanding daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan, yakni sebesar 62,01 %, dengan total kuota Mahasiswa Penerima mencapai 1.495 penerima. Dengan rincian Program Studi A dengan 74 Penerima, Program Studi B dengan 1.315 Penerima, diikuti oleh Program Studi C dengan 106 Penerima. Dan dengan Distribusi kuota yang dominan di Kota Palembang, menunjukkan adanya konsentrasi penerima yang signifikan di wilayah ini. Hal ini tentunya dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, di balik angka yang tinggi ini pula tentunya dapat menimbulkan persoalan dalam pengelolaan program ini. Terutama persoalan terkait dengan isu tidak tepat sasaran dalam pemberian KIP-K. Dalam konteks ini, peran LLDIKTI Wilayah II menjadi krusial dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran KIP Kuliah agar sesuai dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal di kota Palembang.

Jika bantuan tidak tepat sasaran, maka manfaat program tidak akan optimal dan justru dapat menimbulkan permasalahan kembali. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terlaksananya program KIP-K, terutama di perguruan tinggi swasta. Tentunya sudah menjadi tanggung jawab LLDIKTI Wilayah II untuk memastikan bahwa program KIP-K berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini LLDIKTI Wilayah II memiliki peran penting melalui Tugas dan Fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi di Kota Palembang terutama. Tidak hanya itu, sudah menjadi tugas LLDIKTI Wilayah II untuk memfasilitasi terlaksananya program seperti KIP-

K. Dalam konteks ini, LLDIKTI Wilayah II harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, berkenaan dengan program KIP-K ini, juga harus terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program ini. Dengan demikian, LLDIKTI Wilayah II dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi di Kota Palembang.

Mengacu bahwa pentingnya peran LLDIKTI Wilayah II dalam rangka mengawal program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) agar dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan dapat berjalans secara optimal, penelitian ini menjadi sangat relevan. Berdasarkan hal ini, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang implementasi Tugas dan Fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam Pengelolaan Program KIP-K di Kota Palembang Tahun 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Kota Palembang Tahun 2024.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Kota Palembang Tahun 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari Penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik dan kebijakan pendidikan, khususnya terkait dengan bagaimana implementasi program bantuan pendidikan tinggi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi LLDIKTI Wilayah II

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi diri untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam implementasi KIP-K.

#### 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan membantu pemerintah mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam implementasi KIP-K, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan program secara optimal.

#### 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program KIP-K dan mendorong partisipasi mereka dalam program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antono Penulis Pertama, B., & Bintari, A. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg)*.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Arda, I. Z. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Studi Pada Bidang Pendidikan Di Nagari Pangkalan Koto Baru) Sumatera Barat*.
- Badan Pusat Statistik. (2023, December). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenjang Pendidikan*.
- BBC News Indonesia*. (2024). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg67gqezdeyo>
- Elchanan Cohn. (1979). *The Economics of Education*.
- Iswanto et al. (2024). ANALISIS PROBLEMATIKA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN PROBLEM TREE ANALYSIS Oleh. *JMA*, 2(5), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. <https://www.researchgate.net/publication/327762798>
- Kristian, I., Jenderal, U., Yani, A., & Bandung Indonesia, C. (2023). KEBIJAKAN PUBLIK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 21, Issue 2). <http://jurnaldialektika.com/>

- La Suhu Bakri, Suaib Rahmat, Abdul Isman, & Wance Marno. (2021). *BENANG KUSUT BLT DANA DESA TAHUN 2020 DI PULAU GAMUMU KECAMATAN OBI SELATAN (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD Di Desa Mano)*.
- Marwiyah, S. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK, Adminstrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Meutia, I. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Nurasyiah Thary. (2023). *TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PASAL 15 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NO. 1407 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI LURAH STUDI KASUS KELURAHAN CIPADUNG*.
- Pramono, J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*.
- R., R., & M., M. (2023). Implementation of the Keluarga Harapan Program Policy in Aceh Singkil Regency. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 2(08), 33–49. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i08.149>
- Rezki, N., Sholeh, M., Muchsin, S., & Anadza, H. (2021). *IMPLEMENTASI MODEL RICHARD MATLAND DALAM KEBIJAKAN HOME LEARNING DI KONDISI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)* (Vol. 15, Issue 9). <https://probolinggokab.go.id/>
- Riski Sapitri Siregar, D., Ratnaningsih, S., & Sarif Hidayatullah Jakarta, U. (2022). *PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA*. 3(1).
- Ritonga, A., Hadi Jaya, Y., & Sofian, S. (2023). FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. In *Jurnal Mumtaz Januari* (Vol. 3, Issue 1).
- Rizki, N., Dani, R., & Megawati, S. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO*. <https://peta-hd.com/peta-kabupaten->
- Sahroni, T., & Irawaty, S. (2021). *BUANA KOMUNIKASI PERILAKU MAHASISWA DALAM MENANGGAPI INFORMASI HOAKS DI PLATFORM WHATSAPP*. <http://jurnalusbypkpacid/index.php/buanakomunikasi>

- Salsabila et al. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- Sari, D., S. A., M. D., Suwardi, Haris, A., Sudiartini, N. W. A., Wiwin, K., Purnama, E., Fathur, A., Irawan, B., Purba, S., & Ravyansah, R. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Sariri, F. (2024). *EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA*.
- Syaprianto, & Herman, ; (2023). POLICY EFFECTIVENESS OF VILLAGE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT-DD) TOWARD COMMUNITIES AFFECTED IN THE IMPACT OF COVID-19 IN SEMELINANG DARAT VILLAGE, PERANAP SUB-DISTRICT. *Jurnal PubBis*, 7(1), 2023. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i1.725>
- Uli Sinta Dwina. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA CINTA DAMAI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG*.
- Yuniarti, R., Mulyadi, A., & Sampurna, R. H. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 13(1), 8–16. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3595>